

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI (*BASE TRANSCIVER STATION*) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA DI KABUPATEN GRESIK

Dimas Candra Kresna

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

dimaskresna@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo S.H., M.H.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Jumlah pelanggaran Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi (*BTS*) mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 280 *BTS* di Kabupaten Gresik tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (*IMB-M*) secara lengkap. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik hanya mencapai 11 *BTS*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gangguan terhadap efektifitas penegakan hukum administrasi *BTS* yang melanggar *IMB-M*, hal tersebut menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dari gejala sosial yang timbul di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh SKPD terhadap *BTS* yang melanggar *IMB-M* di Kabupaten Gresik tidak efektif, hal ini terlihat pada pemberian sanksi yang belum dilaksanakan terhadap 280 *BTS* yang melanggar *IMB-M*. Efektifitas penegakan hukum tersebut tidak efektif karena dipengaruhi empat faktor yang menghambat pelaksanaannya yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor budaya dan faktor masyarakat.

Kata kunci: *BTS*, sanksi administrasi, izin mendirikan bangunan menara.

Abstract

The number of violations of Establish a Telecommunication Tower (*BTS*) has increased, as many as 280 base stations in Gresik Regency do not have complete building permit (*IMB-M*). The implementation of administrative law enforcement by the Regional Work Unit of Gresik Regency only reached 11 *BTS*. The difference in administrative law enforcement that has been implemented and has not been implemented against *BTS* that violates the license shows the existence of obstacles in the implementation of law enforcement. The purpose of this research is to find out the effectiveness of administrative law enforcement on base transceiver station that do not have tower building permits in Gresik Regency, to find out the factors that influence administrative law enforcement on base transceiver station that does not have tower building permits in Gresik Regency. This research is an empirical legal research that examines the laws of social symptoms that arise in the community. The approach used in this study is a qualitative approach using interview and documentation data collection methods. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that administrative law enforcement carried out by SKPD on *BTS* that violates the *IMB-M* in Gresik Regency is less effective, this can be seen in the provision of sanctions that have not been implemented against 280 *BTS* that violate *IMB-M*. The effectiveness of law enforcement is lacking because it is influenced by four factors that hinder its implementation, namely Law Enforcement Factors, Means Factors, Cultural Factors and Community Factors.

Keywords: *BTS*, administrative sanction, permit to build a tower.

PENDAHULUAN

Dampak negatif dari perkembangan teknologi telekomunikasi berbasis transmisi jaringan dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya dinas yang menangani permasalahan pembangunan dan

penyelenggaraan menara telekomunikasi. Menurut data yang didapatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat OPD) dari evaluasi lapangan, terdapat 171 menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (selanjutnya disebut *BTS*) yang belum

memiliki izin untuk dibangun dan digunakan. Perkembangan teknologi transmisi telepon seluler yang berkembang pesat pada tahun 2000, merupakan salah satu faktor berkembangnya *BTS – BTS* tersebut.

OPD yang melakukan evaluasi dilapangan dan menemukan pelanggaran izin penyelenggaraan menara telekomunikasi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama adalah Komisi A DPRD Kabupaten Gresik dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dan Satuan Pol Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi di Kabupaten Gresik terdapat kendala yang menyebabkan tidak penegakan hukum administrasi tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Hukum administrasi yang berkaitan dengan izin dan bertujuan untuk pengendalian masyarakat, belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik (Adrian Sutedi, 2010:200). Izin pembangunan, penggunaan, dan penyelenggaraan menara telah di atur oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (disingkat Permenkominfo 02/2008).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenkominfo 02/2008 pembangunan menara telekomunikasi “harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Kewenangan dalam pemberian izin dan penyelenggaraanya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkominfo 02/2008 diserahkan kepada daerah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi. Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 02/2008 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Izin pembangunan menara tersebut masuk dalam kategori izin mendirikan bangunan, nomenklatur dalam Permenkominfo 02/2008 izin tersebut dinamakan izin mendirikan bangunan menara (disingkat IMB-M). Orang dan/atau badan hukum yang ingin membangun dan menyelenggarakan *BTS* harus memiliki IMB-M dari pemerintah setempat, namun berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis hal tersebut tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Gresik.

Peraturan pembangunan *BTS* di Kabupaten Gresik diatur dengan Perda 19/2012. Pasal 11 ayat (1) Perda 19/2012 menyatakan bahwa “*Setiap penyedia menara yang akan membangun menara telekomunikasi wajib memiliki: a) izin pemanfaatan ruang; b) izin mendirikan*

bangunan menara, dan c) izin gangguan”. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perda 19/2012 tersebut dapat kita mengerti bahwa pembangunan *BTS* di Kabupaten Gresik memerlukan tiga izin. Perda 19/2012 juga menentukan sebuah sanksi bagi penyedia menara yang membangun menara tanpa izin. Sanksi tersebut merupakan sanksi administratif yang dinyatakan dalam Pasal 33 dan 34 Perda 19/2012.

Sanksi-sanksi tersebut antara lain dapat pemberhentian operasional *BTS*, Penyegehan *BTS*, pembongkaran hingga pengenaan denda terhadap penyedia menara yang melanggar ketentuan dalam kepemilikan IMB-M. Peraturan perundang-undangan yang penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik tentu saja dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Menurut Soerjono Soekanto beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain adalah faktor hukum, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, dan sarana. (Soerjono Soekanto, 2008:8)

Informasi tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong praja sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kendala dalam pelaksanaanya. Penegakan hukum administrasi yang belum dapat dilaksanakan secara baik sehingga terdapat pelanggaran izin-izin tertentu dalam membangun dan menyelenggarakan *BTS* di Kabupaten Gresik. Salah satu indikator dari penegakan hukum administrasi yang tidak berjalan dengan baik adalah banyaknya kasus pelanggaran izin yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini adalah badan hukum yang memiliki *BTS*).

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi terhadap menara telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara di Kabupaten Gresik.

Kajian teoritik dalam penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas hukum, di mana ketika berbicara sejauh mana Efektifitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Adapun mengenai penegakan hukum atau dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement*, penegakan hukum

tersebut merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum merupakan tindakan dari penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang sudah seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan disreksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Hukum perizinan memiliki unsur-unsur, fungsi dan tujuan yang bermaksud pada pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Adapun sanksi-sanksi dalam hukum administrasi dikenal dengan 4 (empat) istilah yakni: a) *bestuurdwang* (paksaan pemerintahan); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c) Pengenaan denda administratif; d) *dwangsom* (pengenaan uang paksa oleh pemerintah). Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sifat sanksi administratif tersebut adalah reparatoir yang berarti memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada warga tersebut diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan. Adapun mengenai menara telekomunikasi merupakan menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya Menara (BTS) berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain. Prosedur izin mendirikan menara telekomunikasi diatur dalam Permenkominfo 2008 dan Peraturan Menteri Bersama, selain dari kedua peraturan tersebut izin penyelenggaraan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing lokasi dimana menara telekomunikasi tersebut akan di bangun dan digunakan. Izin yang digunakan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi menurut peraturan terkait diantaranya adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Pengaturan hukum izin penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Gresik sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (disingkat Perda 19/2012).diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (disingkat Perda 19/2012).diatur oleh Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (disingkat Perda 19/2012). Perda 19/2012 menentukan bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi tiga izin, hal tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap Penyedia menara yang akan membangun menara telekomunikasi wajib memiliki: a) Izin pemanfaatan ruang; b) Izin mendirikan bangunan menara; dan c) Izin gangguan. Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Perda 19/2012 mengatur lebih lanjut mengenai ketiga izin tersebut. Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Perda 19/2012 menyatakan bahwa, permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan melampirkan titik koordinat dan denah lokasi. Izin pemanfaatan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Bupati. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji dari sisi efektifitas penegakan hukum pada Perda 19/2012. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dari sisi yang nyata, dalam artian ini dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris melihat hokum yang bekerja dimasyarakat. Penelitian hukum empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Soerjono Soekanto, 1986:51)

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku mereka yang diamati oleh peneliti. Perilaku yang diamati ini selanjutnya akan diperkuat menggunakan data primer dan data sekunder. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan kendala atau hambatan apa yang ada dalam pelaksanaannya sehingga mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M oleh BTS dalam Perda 19/2012 tersebut dan mengevaluasinya.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya penelitian ini akan dilakukan di Dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Dinas terkait yang dimaksud antara lain: a) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; b) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; c) Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; d) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: a) Kepala dan/atau Staf Terkait Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan; b) Kepala dan/atau Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang; c) Kepala dan/atau Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; dan d) Kepala dan/atau Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:11). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan, dalam hal ini adalah wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan sanksi administratif pelanggaran IMB-M.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini, dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. (Soerjono Soekanto, 1986:22)

Teknik validitas data dari hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Data yang dinyatakan valid (kredibel) melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Validitas data penelitian melalui triangulasi ini akan membuat data yang diolah dalam hasil penelitian dapat dipercaya (kredibel) untuk disajikan kepada pembaca. (Imam Gunawan, 2013:217)

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yakni data yang telah dikumpulkan dengan lengkap melalui wawancara, studi dokumen dan dokumentasi selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk

menyimpulkan kedalam sebuah analisis yang tepat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan langkah-langkah: a) *editing*; b) *classifying*; 3) *verifying*; 4) *analyzing*; 5) *concluding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Di Kabupaten Gresik

Efektifitas Penegakan Hukum Administrasi dalam kasus pelanggaran IMB-M *BTS* di Kabupaten Gresik menggunakan sanksi administrasi sebagai sasaran keberhasilan OPD untuk mencapainya. Sanksi administrasi yang digunakan dalam permasalahan ini adalah sanksi administrasi yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Perda 19/2012 yang antara lain adalah perbaikan, pembongkaran, pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau denda administratif. Sanksi administrasi ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik karena pada dasarnya sebuah sanksi administrasi berbentuk: a) *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c. Pengenaan denda administratif; d. *Dwangsom* (pengenaan uang paksa oleh pemerintah). Bentuk sanksi administrasi tersebut dilaksanakan pemerintah sebagai penegak hukumnya. Pemerintah dalam hal ini dijalankan oleh Bupati Gresik dan OPD yang membidangi perizinan *BTS* terkait.

Penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar ketentuan IMB-M dalam Perda 19/2012 dilaksanakan oleh OPD yang memiliki masing-masing tugas dan fungsinya untuk mengakan Perda 19/2012. DPM-PTSP sebagai dinas yang diberikan wewenang untuk menerbitkan berbagai perizinan yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan *BTS* tersebut. PUTR merupakan dinas yang berwenang untuk merencanakan tata-letak *BTS* dan memberikan rekomendasi kepada DPM-PTSP untuk mengeluarkan IMB-M sesuai dengan rencana tata wilayah kabupaten. Diskominfo sebagai dinas yang memiliki wewenang untuk mengontrol penggunaan (secara teknis frekuensi dan kerjasama antara profider) *BTS* terkait. Terakhir adalah Satpol PP yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan peraturan daerah jika terdapat pelanggaran dalam pembangunan dan penggunaan *BTS*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jumlah *BTS* yang dapat dijadikan sebagai data penegakan hukum terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik. Diskominfo menunjukkan bahwa jumlah *BTS* aktif di kabupaten gresik tahun 2017 adalah sebanyak 334 unit. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik menurut

PUTR seharusnya hanya tersedia 208 wilayah untuk lokasi penempatan *BTS* di tahun 2017. DPM-PTSP menunjukkan data bahwa jumlah menara di Kabupaten Gresik yang telah memiliki IMB-M secara lengkap, keseluruhan berjumlah 54 unit. Penegakan hukum oleh Satpol PP telah dilakukan terhadap 11 unit *BTS* di tahun 2017.

Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 334 unit *BTS* yang terdapat di Kabupaten Gresik tahun 2017 hanya terdapat 54 unit *BTS* yang memiliki IMB-M. Selisih dari ketua jumlah tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat 280 *BTS* di Kabupaten Gresik yang tidak memiliki IMB-M pada tahun 2017. Total 280 *BTS* yang tidak memiliki IMB-M tersebut beberapa diantaranya telah memiliki IPR, HO, Izin Prinsip, Rekomendasi PUTR, Rekomendasi Dinas Perhubungan dan/atau beberapa dari izin-izin tersebut, namun tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan sebuah IMB-M. Penegakan hukum administrasi yang pelaksanaan sanksinya dilakukan oleh Satpol PP hanya dilaksanakan kepada 11 unit *BTS* saja. Angka tersebut menunjukkan bahwa 269 unit *BTS* belum mendapatkan sanksi administratif dari Pemerintah Kabupaten.

Selisih antara *BTS* yang tidak memiliki IMB-M dan jumlah *BTS* yang telah dikenakan sanksi administrasi di tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah hambatan dalam efektifitas penegakan hukumnya. Efektifitas penegakan hukum seperti yang telah dikemukakan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut adalah “faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana / fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.” Beberapa dari faktor-faktor tersebut memberikan hambatan bagi OPD yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar ketentuan IMB-M di Kabupaten Gresik.

Faktor-faktor yang memberikan hambatan kepada efektifitas penegakan hukum *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik adalah Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat. Terdapat tiga faktor dari lima faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh OPD menara di Kabupaten Gresik dapat dikatakan tidak berjalan efektif, karena 60% (enam puluh persen) dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi tersebut memberikan hambatan.

Pelaksanaan penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh OPD tidak efektif dan dipengaruhi oleh salah satu Penegak Hukumnya yaitu Satpol PP. Satpol PP diberikan kewenangan oleh Pasal 4 ayat (1) Perda 50/2016 untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Perda

50/2016 menyatakan bahwa “Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.” Pasal 4 ayat (2) Perda 50/2016 menyatakan bahwa “Selaku Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan, mempunyai tugas: a) melakukan tindakan penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peratuturan Bupati; b) menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati; e) melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

Pelaksanaan penegakan hukum ini tidak efektif karena Satpol PP hanya melakukan penertiban kepada 10 *BTS* yang dilaporkan melanggar ketentuan IPR oleh PUTR. Seharusnya dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi yang dilakukan Satpol PP, diketahui bahwa data yang dimiliki oleh PUTR adalah 208 *Cell Plan* sedangkan hasil evaluasi PUTR terdapat 320 *BTS*. Berdasarkan data ini dapat dipastikan bahwa pelanggaran yang ada untuk *Cell Plan BTS* tersebut ada 112 kasus. Berdasarkan perhitungan antara pelanggaran IPR dengan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terdapat selisih 102 yang tidak diberikan tindakan.

Satpol PP sebagai OPD yang berwenang untuk melakukan penegakan Perda hanya melakukan dua penyegelan *BTS* di tahun 2017. Dua *BTS* yang disegel tersebut adalah *BTS* milik PT Inti bangun Sejahtera di Desa Domas dan *BTS* milik PT Tower Bersama Group di Desa Mojotengah. Pelaksanaan penyegelan ini seharusnya dilakukan kepada 280 *BTS* di Kabupaten Gresik. Selisih penegakan hukum administrasi tersebut berasal dari data yang dimiliki Diskominfo yaitu terdapat 334 *BTS* aktif di Kabupaten Gresik, sedangkan menurut data DPM-PTSP hanya 54 *BTS* yang memiliki IMB-M.

Dua penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut hanya membuat angka penegakan hukum administrasi 1% (satu persen) saja dari keseluruhan 208 *BTS* yang tidak memiliki IMB-M. Berdasarkan data ini efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang tidak memiliki IMB-M dikatakan tidak efektif. Tidak efektifnya penegakan hukum administrasi tersebut

dikarenakan respon dan pelaksanaan oleh penegak hukum yaitu Satpol PP yang lambat.

Faktor sarana merupakan pendukung dalam OPD melaksanakan penegakan hukum administrasi. Dukungan adanya faktor sarana ini merupakan hal yang penting mengingat salah satu sanksi administrasi terhadap pelanggaran IMB-M adalah pembongkaran. Faktor sarana ini tidak efektif karena OPD yang bertugas sebagai pelaksana penegakan hukum yaitu Satpol PP tidak memiliki sarana yang memadai. Sarana yang dimaksud adalah sarana untuk melakukan pembongkaran *BTS*. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perda 50/2016, dan juga berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Perda 19/2012 yang menyatakan bahwa “Setiap penyedia menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dari Bupati.” Sanksi tersebut terdapat pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Perda 19/2012 yang menyatakan bahwa, “Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: a) perbaikan; b) pembongkaran; c) pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau d) denda administratif.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a) pemberian teguran tertulis pertama; b) pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c) pemberian teguran tertulis ketiga; dan d) penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

Sarana-sarana yang dibutuhkan untuk melakukan pembongkaran *BTS* adalah tenaga ahli dibidang kontruksi dan alat berat. Penegakan hukum administrasi berupa pembongkaran *BTS* untuk saat penelitian ini dilakukan, belum pernah dilaksanakan sendiri oleh Satpol PP. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Perda 19/2012 menyatakan bahwa “menara yang satu tahun tidak dimanfaatkan akan dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten”. *BTS* yang satu tahun tidak dimanfaatkan tersebut adalah *BTS* yang disegel oleh Satpol PP, namun hingga selama satu tahun pemilik *BTS* tidak dapat melengkapi izin yang diminta. Fakta yang ada selama ini pembongkaran tersebut tidak dilakukan dan menara tetap berdiri meskipun melanggar ketentuan penataan ruang.

Pembongkaran tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP karena, Satpol PP kekurangan sarana dan tenaga teknis untuk melakukan pembongkaran tersebut. Pelaksanaan pembongkaran dalam penegakan hukum administrasi pelanggaran *BTS* selama ini dibebankan kepada perusahaan pemilik *BTS*. Hambatan dilapangan bahwa pemilik menara sebagian besar enggan mengeluarkan biaya untuk pembongkaran tersebut, sehingga yang terjadi menara yang seharusnya dibongkar tersebut mengalami pembiaran dan tetap berdiri.

Pemerintah Kabupaten Gresik seharusnya lebih memperhatikan kinerja Satpol PP terhadap penegakan hukum administrasi pelanggaran IMB-M oleh *BTS*. Satpol PP merupakan PPNS yang dapat melakukan penegakan perda, jika Satpol PP cenderung lambat dalam melakukan penegakan perda maka para pengusaha *BTS* tersebut tidak akan jera untuk melanggar IMB-M *BTS* kedepannya. Pemerintah Kabupaten Gresik seharusnya juga melengkapi sarana dan fasilitas Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum administrasi berupa Pembongkaran *BTS*. Penambahan fasilitas dan sarana untuk Satpol PP bertujuan agar jika terdapat menara yang lebih dari satu tahun tidak digunakan, maka pembongkaranya tidak perlu menunggu tindakan dari pemilik menara dan Satpol PP dapat melakukan penertiban sendiri.

Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan edukasi, masukan, dan pemahaman kepada masyarakat agar dalam menyetujui pembangunan *BTS* di wilayah mereka untuk mempertimbangkan faktor keselamatan dan tata ruang wilayah kabupaten. Masyarakat dalam hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M. Peran dari masyarakat tersebut dapat dirasakan manakala masyarakat secara efektif melaporkan perizinan yang dimohon oleh pengusaha untuk membangun *BTS* dilingkungan mereka kepada PUTR. Laporan dari masyarakat tersebut dapat mendukung efektifitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran IMB-M oleh *BTS*.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui OPD yang berwenang sebaiknya menerapkan sanksi dalam penegakan hukum administrasi berupa *Besturdwang* yaitu melalui penyegelan (penghentian operasional menara) atau pembongkaran menara. Pelaksanaan *Besturdwang* ini berdasarkan pertimbangan *Pro Besturdwang* yaitu bahwa pemerintah memberikan sanksi *Besturdwang* kepada pelanggar dengan tujuan untuk pencegahan (menunjukan preseden) agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan lagi oleh pihak lain. Semakin sering pelaksanaan *Besturdwang* ini dilakukan maka akan semakin banyak pula preseden yang menunjukan ketegasan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui OPD yang berwenang untuk menindak pelanggaran ini, sehingga para pengusaha *BTS* akan mempertimbangkan pembangunan *BTS* tanpa izin.

Hasil penelitian menunjukan bahwa minimnya pelanggar yang merasa jera dalam pemberian sanksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui OPD menunjukan bahwa *Besturdwang* tersebut tidak efektif. Pemerintah setidaknya perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap pertimbangan *Pro Besturdwang* untuk memberikan sanksi terhadap menara-

menara yang tidak memiliki IMB-M ini. Pengkajian ulang mengenai pertimbangan *Pro Bestudwang* ini diperlukan mengingat dalam hasil penelitian telah dijelaskan bahwa, setelah penyegelan dilakukan tersebut menara-menara baru tanpa IMB-M sudah terbangun lagi.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (disingkat Perda 15/2013) menyatakan bahwa “Masyarakat berperan serta untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum guna mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan”. Pernyataan Pasal 27 ayat (1) Perda 15/2013 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam terwujudnya ketertiban umum termasuk dalam hal IMB-M. Wujud peran serta masyarakat dapat melalui apa yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Perda 15/2013 yang menyatakan bahwa, “Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam penyusunan kebijakan, pengawasan atau melaporkan/ mengadukan segala bentuk pelanggaran ketertiban umum kepada pejabat yang berwenang.”

Faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Efektifitas penegakan hukum administrasi pelanggaran IMB-M oleh *BTS* di Kabupaten Gresik ini terhambat oleh faktor masyarakat di beberapa daerah *BTS* yang acuh. Masyarakat kurang memiliki perhatian terhadap tata ruang wilayah lingkungannya. Masyarakat seringkali dikalahkan dengan faktor finansial, hal ini biasa terjadi dimana perusahaan yang akan membangun *BTS* di wilayah masyarakat tersebut memberikan sumbangan tertentu berupa uang atau barang (seperti pembangunan pos kamling atau sarana yang dibutuhkan masyarakat lainnya) agar mendapatkan izin dari masyarakat setempat.

Pemberian sumbangan ini biasanya sudah didahului rapat (musyawarah) antar warga sendiri yang dipimpin oleh pejabat setempat (RT/RW). Hasil dari keputusan musyawarah tersebut lebih banyak menunjukkan bahwa keputusan masyarakat setempat tidak mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah. Masyarakat tidak mempertimbangkan hal tersebut karena tidak mengetahui prosedur dan tata ruang wilayah di tingkat Kabupaten. Masyarakat selama ini cukup diberikan sejumlah sumbangan berupa uang kas untuk wilayah atau pembangunan sarana/fasilitas agar para pengusaha mendapatkan persetujuan dari warga setempat dimana *BTS* mereka akan di bangun.

Masyarakat kurang menyadari bahaya dari keberadaan *BTS* di lingkungan mereka sehingga kurang menghiraukan hal tersebut. Masyarakat juga tidak menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik melarang *BTS* tersebut berdiri di luar *Cell Plan* yang ditentukan oleh PUTR. Menurut masyarakat selama

mereka mendapat keuntungan dari pembangunan menara di lingkungan mereka, maka mereka tidak akan membuka suara untuk protes atau demonstrasi. Hambatan ini menjadi berarti ketika masyarakat tidak memberikan informasi/laporan kepada dinas-dinas terkait bahwa terdapat menara berdiri di lingkungan wilayah mereka.

Kendala Yang Dialami Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Melakukan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Menara Telekomunikasi (Base Transceiver Station) Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Di Kabupaten Gresik

Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah kendala-kendala yang dialami oleh OPD dalam melakukan penegakan hukum administrasi terhadap Menara Telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Di Kabupaten Gresik. Masing-masing OPD mengalami kendala yang berbeda-beda dalam melakukan penegakan hukum administrasi terhadap Menara Telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Di Kabupaten Gresik.

DPM-PTSP tidak mengalami kendala ataupun hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Perda 19/2012. DPM-PTSP sebenarnya adalah sebagai satu bagian dari OPD yang menangani segala jenis dokumen dan perizinan sebelum menara tersebut dibangun. Sehingga peran DPM-PTSP dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M sebenarnya tidak ada, namun dalam hal verifikasi dokumen dan kelengkapan izin DPM-PTSP dapat membantu OPD yang lain untuk melaksanakan penegakan hukum.

Diskominfo tidak mengalami hambatan atau kendala dalam melakukan penegakan hukum IMB-M, karena sebenarnya Diskominfo kurang relevan jika dihubungkan dengan penegakan Hukum IMB-M. Tugas Diskominfo dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan penyelenggaraan terhadap penggunaan menara telekomunikasi. Secara hukum diskominfo tidak memiliki Hak atau Tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M yang diberikan oleh Perda 19/2012. Peran Diskominfo dalam Penegakan hukum ini adalah sebagai dinas yang dapat membantu PUPR untuk memberikan informasi berapa jumlah keseluruhan menara yang aktif digunakan, dimana letak menaranya berdasarkan radius penggunaan, dan Provider apa saja yang ada dan menggunakan *BTS* tersebut.

Kendala yang dialami oleh Dinas PUPR antara lain berasal dari Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya. Masyarakat dalam hal ini adalah Pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap IMB-M tersebut. Masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut

tidak taat hukum dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap IPR yang seharusnya dipenuhi sebelum membangun *BTS* tidak dipenuhi. Budaya dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat disekitar zona pembangunan *BTS* yang kurang memahami hukum dan peraturan bahwa dalam pembangunan *BTS* memerlukan IPR yang berguna untuk mengevaluasi Gangguan dan Keselamatan masyarakat sekitar zona *BTS* tersebut. Budaya masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan dari pembangunan *BTS* tersebut mengesampingkan kewajiban bahwa jika masyarakat melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Orang dan/atau Badan hukum maka mereka harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Faktor Sarana, Penegak Hukum dan Faktor Hukum tidak memberikan hambatan kepada Dinas PUPR dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M. Sarana yang dimiliki oleh Dinas PUPR untuk melakukan penegakan hukum pelanggaran IMB-M telah memadai. Kelengkapan perangkat atau bagian-bagian dan personil dari Dinas PUPR telah lengkap untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M. Dinas PUPR juga tidak mengalami hambatan dari segi penafsiran peraturan yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M.

Faktor yang menghambat Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB-M adalah faktor sarana dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan penyegelan dan pembongkaran. Berdasarkan Pasal 34 Perda 19/2012 pembongkaran dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, pembongkaran menara tersebut dibebankan kepada pemilik menara karena Pemerintah Kabupaten Gresik belum memiliki sarana yang memadai untuk membongkar *BTS*. Hambatan penegakan hukum ini di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan Satpol PP sebagai Petugas dari Bupati melaksanakan pembongkaran manakalah pengusaha pemilik menara tidak mengindahkan perintah pembongkaran yang diperintahkan oleh Bupati Gresik dan di Delegasikan ke Kepala Satpol PP.

Hambatan yang kedua berasal dari masyarakat yang menjadi pemilik *BTS*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan pembangunan *BTS* mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Gresik memiliki hambatan besar dalam penegakan hukum IMB-M. Informasi tersebut menyebabkan cukup banyak dan seringkali perusahaan membangun *BTS* tidak memiliki IMB-M di Kabupaten Gresik, hal ini berbeda dengan Kota dan Kabupaten lain yang dapat menunjukan *Pro Besturdwang* yang kuat.

Masyarakat yang menjadi pemilik *BTS* juga tidak memperhatikan surat perintah untuk melakukan pembongkaran yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Budaya masyarakat sekitar yang acuh dengan keselamatan dan mementingkan keuntungan golongan atau kumunitas juga menjadi sedikit hambatan bagi Satpol PP untuk menegakan Perda. Seharusnya masyarakat sekitar jika mengetahui ada pembangunan *BTS* di sekitar pemukiman mereka hendaknya mereka dapat melaporkan kepada Satpol PP melalui layanan telepon ketertiban masyarakat atau datang langsung ke Kantor Satpol PP. Pengawasan dari masyarakat ini tidak dijalankan karena selama ini sebagian besar masyarakat memperoleh keuntungan tertentu dalam pembangunan *BTS* yang berlokasi di sekitar pemukiman mereka.

DPM-PTSP, PUTR, dan Satpol PP memiliki kendala yang sama satu sama lain, kendala yang dimaksud tersebut adalah lambatnya respon dari pemilik *BTS* ketika diberikan peringatan untuk melakukan pengurusan izin. Pengusaha sebagai pemilik *BTS* seringkali menanggapi panggilan dan peringatan OPD melebihi waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan sebenarnya adalah 21 hari berdasarkan surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh masing-masing dinas bersangkutan. Peringatan untuk pelanggaran IPR akan dikeluarkan oleh PUTR, sedangkan peringatan untuk pelanggaran Izin Prinsip, HO, Lingkungan dan IMB-M dikeluarkan oleh DPM-PTSP.

Pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh OPD terkendala respon yang diberikan oleh pemilik *BTS*, sehingga pekerjaan OPD terhambat dan pemberian sanksi administrasi tidak dapat dilakukan sesuai yang dinyatakan dalam Perda 19/2012. Tanggapan dari pemilik *BTS* selama ini ada pada saat pelaksanaan sanksi *Polisional* dan / atau pencabutan izin, sehingga penegakan sanksi administrasi terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik pelaksanaanya cenderung memerlukan waktu yang lama.

Terdapat beberapa pemilik menara yang dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap teguran tertulis dan/atau panggilan yang diberikan OPD. pembiaran tersebut akan berlangsung dalam batas waktu satu tahun hingga menara tersebut akan dibongkar. Pelaksanaan sanksi pembongkaran ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perda 19/2012. Pembongkaran tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP dalam kurun waktu 15 hari sejak keputusan sanksi pembongkaran di terbitkan oleh Bupati. Pelaksanaan sanksi pembongkaran selama ini belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam pelaksanaanya dilapangan.

Satpol PP mengalami kendala kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembongkaran *BTS*. Saat

ini belum ada sama sekali *BTS* yang dibongkar oleh Satpol PP walaupun telah melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Perda 19/2012. Pembongkaran *BTS* tersebut atas pelaksanaan dan biayanya dibebankan ke pemilik *BTS*, namun sayangnya selama ini pemilik *BTS* tidak ada yang merespon surat perintah pembongkaran *BTS* mereka. Berdasarkan hal ini menurut penulis kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik adalah kendala kurangnya saran dan prasarana milik OPD.

PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum terhadap *BTS* yang melanggar ketentuan IMB-M di Kabupaten Gresik tidak efektif, karena terdapat empat faktor yang menghambat penegakan hukum administrasi tersebut dilakukan. Keempat faktor yang menghambat tersebut antara lain adalah faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Satu faktor yang efektif yang terdapat dalam penegakan hukum administrasi pelanggaran IMB-M oleh *BTS* di Kabupaten Gresik, faktor tersebut adalah faktor hukum.

Kendala yang dialami oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melakukan penegakan hukum administrasi tersebut antara lain adalah; sarana yang dimiliki SKPD terbatas untuk melakukan sanksi administrasi pembongkaran *BTS*. Kendala juga timbul dari pemilik *BTS* yang lambat dalam memenuhi peringatan dan panggilan SKPD untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran IMB-M yang dilakukan oleh pemilik *BTS*. Masyarakat dalam kasus ini juga tidak mendukung pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik, hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih mementingkan kebutuhan finansial wilayah daripada hukum administrasi yang diatur dalam Perda Kabupaten Gresik dan Keselamatannya.

Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Gresik harus segera memenuhi sarana / fasilitas hukum yang dibutuhkan oleh Satpol PP untuk melaksanakan pembongkaran terhadap *BTS* yang melanggar IMB-M. Satpol PP sebagai penegak hukum perda (Non Yustisial) sebaiknya berkerja lebih ekstra dalam menangani kasus pelanggaran IMB-M ini, karena menurut penulis semakin banyak pembiaran yang dilakukan maka akan semakin banyak *BTS* yang melanggar IMB-M di Kabupaten Gresik. SKPD harus lebih tegas dalam memberikan sanksi tersebut, jika pemilik *BTS* tidak kooperatif dalam menyelesaikan

pelanggaran yang dilakukannya, maka dapat segera dilakukan eksekusi bongkar *BTS*.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui DPM-PTSP dapat memberikan masukan atau pengetahuan terhadap masyarakat agar turut serta dalam membantu pelaksanaan penegakan hukum administrasi di Kabupaten Gresik. Peran serta masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen izin yang resmi dikeluarkan oleh SKPD sebelum pemilik *BTS* membangun *BTS* di wilayah mereka. Dengan hal ini kontrol dan pengawasan izin yang dilakukan oleh SKPD dapat lebih cepat dan segera ditangani, sehingga penyegelan *BTS* oleh Satpol PP dapat dilakukan sebelum *BTS* tersebut telah terbangun sepenuhnya dan difungsikan.

Daftar Pustaka

- Admosoedirjo, Prajudi. 1986. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali, Achmad dan Wiwie Haryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief, Barda Nawawi. 2013 *Kapita Selekta Hukum Pidana, cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya.
- Ashididqie, Jimly dan M ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filasafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- Hadjon, Phillipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Iradath. 2010. *Sistem Komunikasi II*. Jakarta: Erlangga
- Lopa, Baharuddin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang

- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Grafika Press.
- Manurung, Evelyn Angelita P. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- O.K.Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Raharja, Ivan Fauzani. 2014. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. (*Jurnal Hukum Inovatif Volume VII No. II*) Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Biru.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958;
- _____. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1191.
- _____. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 734
- _____. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 15.
- _____. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 19, beserta Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
- _____. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo /03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532.
- _____. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.
- Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM). 2010. *Jenis Menara Telekomunikasi Di Indonesia*. Surabaya: STIKOM.
- Siagan, Sondang P. 2002. *Kiat meningkatkan produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Witanto, Darmoko Yuti. 2011. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta